

# Pelayanan Keagamaan Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur)

Muhtar

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Email : muchtarsiswoyo@yahoo.com

Naskah diterima redaksi tanggal 23 Maret 2015, diseleksi 7 April 2015 dan direvisi 10 April 2015

## Abstract

*The research aims to discover the religious services, problems, and social cultural interaction between border area communities and Timor Leste communities. The result shows that the religious living in Belu border area and Malaka indicates tolerant, conducive, and harmonious condition. Some areas that show religious tolerance are Kletek and Suai. Their communities consisting of Islam, Catholicism, and Protestantism are amicable because they have strong kinship. Overall, the communities have not got the sufficient services undertaken by Ministry of religious affairs in Belu regency. The limited budget to hold some program also occurs. Additionally, It is required to add some committee for Hinduism, Buddhism, and Confucianism in organization structure in Ministry of religious affairs in Belu regency.*

**Keywords:** Religious Services, Cultural Interaction, Border Area

## Pendahuluan

Kajian terhadap masyarakat di kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut batas-batas fisik dan pembangunan manusia, tetapi juga mengenai interaksi antar manusia yang berbeda kebudayaan. Komunikasi dan interaksi, selain menghasilkan pertemuan kebudayaan, seringkali menimbulkan persoalan sikap saling membandingkan kondisi dan situasi wilayah negara

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan keagamaan, problematika, interaksi budaya masyarakat kawasan perbatasan dengan masyarakat negara Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan kehidupan umat beragama di perbatasan Kabupaten Belu, dan Malaka berjalan penuh toleransi, rukun, dan dalam keadaan kondusif. Ada beberapa wilayah yang dapat dijadikan contoh kerukunan hidup beragama, seperti halnya di Desa Kletek, dan Suai di mana komunitas Muslim, Katolik, dan Kristen berjalan penuh dengan kekeluargaan karena saling terkait kekerabatan. Secara keseluruhan, pelayanan agama yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Belu belum cukup dirasakan oleh masyarakat. Masih terdapat beberapa kendala keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan program, terutama bagi agama Hindu, Buddha, dan Konghucu perlu adanya seksi khusus dalam struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Belu.

**Kata kunci:** Pelayanan Keagamaan, Interaksi Budaya, Kawasan Perbatasan

masing-masing. Salah satu persoalan yang terkait dengan kehadiran pelayanan di kawasan perbatasan adalah pelayanan keagamaan. Persoalan pelayanan agama di daerah perbatasan juga memiliki beberapa persoalan penting. Pertama, sebagai wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga rentan terhadap masuknya ideologi asing yang tidak selalu paralel dengan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bahkan daerah perbatasan disinyalir menjadi lalu-lintas

persenjataan oleh teroris lintas negara. Kedua, pengembangan SDM pelayanan keagamaan di daerah perbatasan relatif lebih rendah jika dibanding dengan daerah-daerah lain terutama yang dekat dengan ibu kota provinsi (“Kemenag Nunukan Minta Madrasah Negeri di Daerah Perbatasan”, *Tribunnews.com*, diakses 5 Januari 2014). Karena relatif lebih rendah, maka pemerintah melalui Kementerian Agama mencoba membangun dan mengembangkan pendidikan agama untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain (“Pemerintah Kembangkan Pesantren Perbatasan”, *Republika Online*, <http://www.republika.co.id>, diakses 24 Desember 2013). Ketiga, persoalan *physical presence* dimana bagian terbesar daerah perbatasan minim dengan simbol-simbol ini (“Menteri Agama Bakal Hadiri Peletakan Batu Pertama”, <http://www.haluankepri.com>, diakses 14 Desember 2013).

Tidak hanya minimalnya fasilitas fisik pelayanan keagamaan, tetapi kehadiran aparatur pelayanan keagamaan dan minimnya akses pelayanan keagamaan menjadi problem utama. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan perbatasan dengan negara Timor Leste, di antaranya adalah Kabupaten Belu. Pintu perbatasan di NTT yang relatif lengkap dan sering digunakan sebagai akses lintas batas adalah di Kecamatan Tasifeto Timur, pintu perbatasan tersebut bernama Mota'ain yang menghubungkan antara Belu dan Batu Gede, Timor Leste dan menjadi pintu utama perlintasan para pengunjung pasca kerusuhan tahun 1999 yang terjadi karena konflik antara pihak pro-integrasi dan pro-kemerdekaan di Timor Timur. Daerah ini sebagai tempat interaksi dan pertemuan antara warga asal Belu dan warga pendatang. Dalam perjalanannya peran masyarakat “tradisional” komunitas Kristen tersebut belakangan ini cenderung mengalami pergeseran, berpindah ke

tangan komunitas Muslim. Gelombang pendatang yang mayoritas Islam dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan menambah padatnya penduduk dan mereka yang mayoritas Islam menguasai bidang ekonomi karena sulitnya masuk birokrasi yang sudah dikuasai oleh Kristen. Kaum pendatang inilah yang banyak menyumbang penajaman segregasi penduduk berbasis agama karena faktor perkawinan, perpindahan penduduk dan mata pencaharian serta tempat tinggal (Ratnawati, 2006: 51).

Pelayanan keagamaan di kawasan perbatasan selain dihadapkan pada berbagai isu yang terkait dengan berbagai persoalan interaksi sosial, ekonomi budaya dan agama, juga persoalan-persoalan kerawanan ekonomi, rendahnya pendidikan, rendahnya akses pelayanan publik, kerawanan keamanan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah, antara lain: 1). Bagaimana gambaran pelayanan keagamaan bagi masyarakat kawasan perbatasan di wilayah layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu? 2). Bagaimana problematika pelayanan keagamaan masyarakat kawasan perbatasan di wilayah layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu? 3). Bagaimana interaksi budaya antara masyarakat kawasan perbatasan di wilayah layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu dengan masyarakat negara Timor Leste menjadi faktor yang melatarbelakangi pelayanan keagamaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu? 4). Bagaimana kebutuhan masyarakat kawasan perbatasan di wilayah layanan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Belu?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Mengetahui gambaran pelayanan keagamaan bagi masyarakat kawasan perbatasan di wilayah layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu; 2). Mengetahui problematika pelayanan

keagamaan bagi masyarakat kawasan perbatasan di wilayah layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu; 3). Mengetahui interaksi budaya antara masyarakat kawasan perbatasan di wilayah layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu dengan masyarakat wilayah negara Timor Leste; 4). Mengetahui kebutuhan masyarakat kawasan perbatasan di wilayah layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu terhadap pelayanan keagamaan.

Dalam penelitian ini peneliti membahas gambaran pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu bagi masyarakat di kawasan perbatasan yang dapat dikembangkan dalam ruang lingkup dan indikator pelayanan keagamaan. Penelitian ini juga akan membahas beberapa hal seputar problematika pelayanan keagamaan yang ada di sekitar masyarakat kawasan perbatasan; hubungan dan interaksi budaya antara masyarakat kawasan perbatasan di wilayah layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu dengan masyarakat negara Timor Leste dalam kehidupan keseharian; faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelayanan keagamaan termasuk mencari jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut; apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat kawasan perbatasan di wilayah layanan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Belu. Selanjutnya terkait indikator pelayanan keagamaan, hal ini dapat dipahami dengan melihat: prosedur; persyaratan pelayanan; kejelasan petugas; kedisiplinan petugas dan tanggungjawab petugas pelayanan; kemampuan petugas dalam melayani; terkait dengan kecepatan; keadilan; kesopanan dan keramahan petugas; kewajaran biaya; kepastian biaya; kepastian jadwal; kenyamanan lingkungan, dan keamanan lingkungan dalam melayani.

Terkait dengan fokus penelitian ini, ada beberapa konsep tentang daerah perbatasan yang perlu dikemukakan. Pada Pasal 1 (6) UU Nomor: 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menjelaskan bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Selain itu, terdapat istilah lain dalam Perpres 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. 92 pulau terluar yang dimiliki Indonesia digunakan sebagai titik dasar dalam menetapkan garis batas wilayah NKRI. Ini artinya, titik persoalannya adalah batas-batas fisik antara negara Indonesia dengan negara tetangga.

Penelitian ini tidak menganalisis batas-batas fisik antar negara, tetapi bagaimana batas tersebut telah melampaui persoalan-persoalan fisik. Kehidupan masyarakat daerah perbatasan memiliki sistem dan pemaknaan yang silang kebudayaan, sehingga ruang-ruang sosial, budaya, ekonomi, dan agama menjadi bagian yang saling bersentuhan antar negara. Kedua negara dalam batas-batas fisik tersebut, seolah-olah hadir secara bersamaan. Masyarakat menggunakan dua kebudayaan secara bersama-sama. Tidak adanya kekuatan dominan yang berhak mengatur pergaulan antar budaya dan antar negara di daerah perbatasan – dalam hal ini kekuatan negara yang represif – merupakan peluang tersendiri jika disikapi secara tepat. Meminjam istilah François Lyotard (2004), masyarakat di daerah perbatasan relatif terbebas dari bercokolnya “narasi besar” yang berwatak totaliter.

Dalam perspektif kebudayaan, identitas *hybrid* tidak menjadi persoalan, karena kehidupan global memang mengandung konsekuensi hilangnya batas-batas kebudayaan antar negara.

Namun, dalam konteks pelayanan publik dan birokrasi, persoalan ini menjadi sangat penting, terlebih jika dikaitkan dengan nasionalisme ke-Indonesia-an yang sedang berubah. Oleh sebab itu, dalam riset ini daerah perbatasan secara fisik tidak hanya berbasis kecamatan, tetapi daerah perbatasan akan diperluas hingga tingkat kabupaten/kota. Bahkan secara sosiologis dan antropologis, wilayah ini bisa lebih melebar, dengan melihat implikasi-implikasi sosial, budaya, dan agama.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan selama 15 hari di Kabupaten Belu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintah di Kabupaten Belu dengan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki informasi yang aktual tentang pelayanan keagamaan. Selain wawancara dilakukan diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu yang dihadiri oleh para tokoh agama (Katolik, Kristen, Islam dan agama Hindu). Sedangkan FGD kedua dihadiri oleh perwakilan unsur pemerintah dari berbagai sector yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Kementerian Agama Belu, Dinas Kesbangpol, Bina Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Belu. Selain wawancara dan FGD, dilakukan observasi dengan mengamati berbagai kehidupan masyarakat seperti pola interaksi dan aktivitas mereka baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun aktivitas keagamaan. Teknik lain yang digunakan adalah kajian pustaka (analisis dokumen) sehingga hasil penelitian ini akan dideskripsikan dan sedapat mungkin dapat memberikan kejelasan terhadap sasaran penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Sekilas Kabupaten Belu

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 2.445,57 KM persegi. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombay, Selatan Laut Timor; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan sedang di sebelah timur berbatasan dengan Negara Republik Demokratis Timor Leste (RDTL). Secara administratif, Kabupaten Belu terdiri atas 24 kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 195.554 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan agama terdiri atas: Katolik 178.769 jiwa atau 80.72%, sisanya adalah umat Kristen, Islam, Hindu serta Buddha & Khonghucu (BPS, 2013: 37).

Secara umum pelayanan keagamaan di kawasan perbatasan Kabupaten Belu praktis dimulai pada 29 Agustus 1984 seiring diresmikannya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu (Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, 2012: 5). Masalah keagamaan yang terjadi di Kabupaten Belu secara umum relatif cukup baik. Permasalahan yang terjadi justeru seputar masalah sosial ekonomi. Kalaupun ada penodaan agama, itu terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap keyakinan bagi pemeluk agama lain seperti penodaan hosti, yaitu penodaan dari Kristen ke Katolik. Namun demikian, problem ini dapat diselesaikan secara adat. Permasalahan lainnya adalah permasalahan agama yang melibatkan majikan dengan pembantu. Namun persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum dan sama sekali tidak ada motif menggiring kepada agama tertentu. Senada dengan penjelasan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Kepala Kasi Uraka, Zakarias Seran menambahkan bahwa ada beberapa tempat yang dapat dijadikan potret

kerukunan baik intern maupun antar umat beragama, yaitu di daerah Malaka Tengah, di Kecamatan Betun, Desa Kletek, dan Suai. Di sana terdapat bangunan masjid yang berdekatan dengan Capela. Masjid tersebut merupakan masjid tertua di Malaka (H Akrim Moka, Kepala Seksi Pendidikan, dan Bimbingan Masyarakat Islam. Wawancara. 06 April 2014). Donatus Mau juga menjelaskan bahwa interaksi dan pembauran masyarakat di perbatasan dengan latar perbedaan budaya dan agama, dalam sejarahnya hingga sekarang saat penelitian dilakukan belum terdapat pergesekan (Donatus Mau, Penyuluh Agama Katolik. Wawancara. 06 April 2014).

Secara khusus, pelayanan Agama Katolik di lingkup Kabupaten Belu cukup baik. Pelayanan yang dilakukan Seksi Urusan Agama Katolik, seperti penyuluhan agama, pemberian bantuan sosial keagamaan, pembinaan mental, terwujudnya keluarga sejahtera Katolik, peningkatan agama Katolik yang difokuskan pada pemahaman al-kitab, di setiap kecamatan dan paroki (Maria Rosa T. Manik, Penyuluh Agama Katolik di Kementerian Agama Kabupaten Belu. Wawancara. 14 April 2014). Dalam pelayanan keagamaan umat Katolik, di Kementerian Agama Kabupaten Belu terdapat 7 Orang penyuluh yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 76 Penyuluh Agama Honorar.

Dalam agama Katolik, peranan organisasi gereja sangat memegang peranan penting, khususnya pada persoalan sosial keagamaan Katolik. Hal ini dikarenakan mereka memiliki struktur organisasi gereja yang hierarkis dan berjenjang. Struktur ini dapat diketahui dan dijalankan sesuai ketentuan Konsili Vatikan II. Khusus struktur Dewan Pastoral Paroki, yang membawahi Stasi, Lingkungan, dan Kelompok Umat Basis (KUB) membuat posisi Paroki sentral di masyarakat, khususnya masyarakat

Katolik. Koordinasi dan persetujuan yang melibatkan DPP (Dewan Pastoral Paroki) memiliki tempat, dan posisi yang amat menentukan bagi pembinaan, dan keberhasilan penyuluhan yang diselenggarakan kementerian agama. Tanpa koordinasi dan kerjasama DPP (Dewan Pastoral Paroki) dengan Kementerian Agama, kegiatan pelayanan dan pembinaan di bidang agama tidak dapat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan pengamatan lapangan, dan data hasil wawancara dengan para Penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Belu pada tanggal 24 Maret 2014 diperoleh penjelasan bahwa Paus merupakan pimpinan tertinggi Gereja Katolik dan berkedudukan di Vatikan. Paus membawahi seluruh uskup di seluruh dunia. Uskup adalah pimpinan umat Katolik pada suatu wilayah Keuskupan (*diocesan*), dan kedudukan para uskup adalah pengganti para Rasul Yesus. Uskup membawahi wilayah keuskupan yang dibagi ke dalam wilayah Paroki-Paroki. Pastor Paroki memimpin umat wilayah Paroki. Di bawah Paroki diatur wilayah-wilayah kecil lagi sesuai kebijakan keuskupan dan Paroki setempat, di mana pimpinan umat di bawah wilayah Paroki ini dipegang oleh awam (umat biasa yang bukan termasuk hirarki). Pembagian wilayah di bawah Paroki ini di Kabupaten Belu bernama Stasi, Lingkungan dan KUB (Kelompok Umat Basis).

Lebih lanjut, Ibu Elizabet menjelaskan bahwa kewenangan penyuluh agama Katolik hanya bisa di tingkat KUB (Kelompok Umat Basis), itu pun dengan persetujuan DPP (Dewan Pastoral Paroki), penyuluh meminta izin kepada organisasi gereja dan apabila diperbolehkan, maka dijalankan program penyuluhan. Dijelaskan oleh Deki Hermawan, penyuluh Agama Katolik yang tergabung dalam kelompok Kelompok Kerja Penyuluh

(POKJALU) yang dibentuk pada tahun 2011, terdapat beberapa permasalahan yaitu terkait dengan keahlian penyuluh yang kurang memadai, karena bukan berlatar belakang agama. Penyuluh yang ada lebih banyak karena *impasing*, pelimpahan dari pejabat eselon lima yang tidak memiliki keterampilan sebagai penyuluh. Persoalan lainnya, penyuluh juga sering diperbantukan sebagai tenaga administrasi kantor dikarenakan kurangnya tenaga. Selain itu penyuluh di kelompok binaannya kurang mendapat tempat yang semestinya sehingga pelayanan kurang maksimal. Umat Katolik merasa lebih memperhatikan kepasturan dan keuskupan, dari pada penyuluh sendiri. Bahkan kelompok binaan yang ada menghadapi banyak tantangan karena jumlah penyuluh dirasakan kurang. Apabila di suatu tempat penduduknya banyak, maka kelompok binaan bertambah hingga 20 kelompok binaan, bagi daerah yang jarang jumlah penduduknya, terdapat 15 kelompok binaan.

Penyuluh agama juga lebih menjalankan kegiatannya pada sore dan malam hari, karena pagi harinya mereka bertugas di kantor dengan mengerjakan beban kerja administrasi. Di samping itu, selain belum diberdayakannya Kelompok Kerja Penyuluh (POKJALU), ada kendala lain di antaranya minimnya keterampilan penyuluh, kurang disiplinnya kelompok binaan serta jauhnya jarak lokasi binaan. Pimpinan yang kurang mendukung keberadaan penyuluh juga menyebabkan kelompok binaan sulit untuk dikumpulkan, ditambah lagi banyak dari kelompok binaan harus bekerja. Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas bagi penyuluh seperti transportasi, dan perangkat kerja lainnya.

Di kalangan agamawan, dan tokoh masyarakat juga diperoleh beberapa data terkait pelayanan keagamaan di kawasan perbatasan yaitu kinerja penyuluh agama

telah cukup dirasakan. Perwakilan agamawan Katolik menyatakan bahwa setidaknya dibutuhkan 3 penyuluh untuk tiap Paroki. Selama ini hanya terdapat 1 keuskupan, 34 Paroki/gereja, 161 kapela, dan 76 Stasi. Setiap paroki membina tiga kategori jamaah, antara lain dewasa, muda–mudi dan anak–anak. Selain itu, mereka juga menyampaikan kebutuhan pembangunan dan renovasi rumah ibadah yang masih menjadi kebutuhan (FGD. 26 Maret 2014). Namun demikian, kebutuhan bantuan pembangunan dan renovasi rumah ibadah terjawab dengan adanya bantuan sosial keagamaan seperti perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah. Hal ini terlihat dalam beberapa kesempatan kunjungan ke Kapela di Suai, Betun, Malaka Tengah, di sana sedang dilakukan renovasi penambahan ubin di lantai Kapela. Mereka mendapatkan bantuan 10 juta dari Kementerian Agama Kabupaten Belu.

Dalam hal pembinaan mental, untuk mewujudkan keluarga sejahtera Katolik, program ini dilakukan oleh instansi Kementerian Agama Kabupaten Belu dengan terjun langsung ke beberapa tempat, atau sasaran komunitas masyarakat Katolik. Di sinilah terdapat perbedaan peranan antara penyuluh PNS, dan honorer, serta jajaran Seksi Urusan Agama Katolik lainnya pada Kementerian Agama Kabupaten Belu. Penyuluh honorer memiliki kewajiban tetap, memberikan penyuluhan kepada Paroki atau umat binaan tertentu. Sementara penyuluh PNS dan jajaran Seksi Urusan Katolik memiliki tugas yang mencakup setiap aspek program seksi Urusan Agama Katolik (Maria Rosa T. Manik. Wawancara. 14 April 2014).

Peningkatan pengetahuan keagamaan Katolik difokuskan pada pemahaman Al-kitab, dilakukan kegiatan Quis Kitab Suci Keluarga seperti yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Belu pada tanggal

12-14 September 2013 di Hotel Paradiso Atambua. Kegiatan Quis Kitab Suci Keluarga ini dihadiri oleh utusan-utusan keluarga terbaik dari Paroki-Paroki se-Dekenat Belu Utara dan Dekanat Malaka. Jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri atas 1 keluarga inti (Bapak-Mama & Anak) dari 10 Paroki se-Kabupaten Belu. Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan wawasan, pengetahuan, pemahaman dan penghayatan Sabda Tuhan dalam hidup keluarga Katolik; menumbuhkan, dan menggairahkan minat baca Kitab Suci di kalangan umat dan keluarga Katolik, dan mewujudkan keluarga Katolik yang berilmu, beriman, bermoral dan bermartabat (<http://ntt.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=157515>, diakses 14 April 2014).

Dalam bidang penyuluhan Agama Kristen, pelayanan keagamaan Kabupaten Belu dilakukan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen. Saat ini Seksi Bimbingan Masyarakat memiliki dua tugas besar yaitu di bidang pendidikan dan urusan Agama Kristen. Dalam tulisan ini, penulis membatasi pada beberapa aspek antara lain: penyuluhan dan budaya keagamaan, pemberian bantuan sosial keagamaan, pembinaan mental, membantu terwujudnya keluarga sejahtera Kristen, peningkatan pengetahuan keagamaan Kristen. Kristen adalah agama terbesar kedua di wilayah Kabupaten Belu, dan Malaka. Di sana terdapat delapan aliran gereja, 2 orang penyuluh PNS, dan 6 orang penyuluh honorer. Jumlah penyuluh honorer ini memiliki penurunan dari tahun ke tahun, dari 100 penyuluh honorer, menjadi 30, dan 6 penyuluh. Fenomena penurunan jumlah penyuluh honorer ini dirasakan berat dampaknya oleh agama Kristen, mengingat cakupan wilayah pelayanan mencapai 17 wilayah, dengan 82 gereja, dan pemeluk agama yang mencapai kisaran 25.055 jiwa.

Idealnya, penyuluh harus disesuaikan dengan jumlah gereja yang ada, yaitu sebanyak 82 gereja dengan masing-masing gereja diberikan tiga penyuluh honorer. Bahkan menurut Stefanus Boisal penyuluh honorer tersebut tidak hanya mewakili pendeta, dan guru agama semata. Mengingat persoalan pemuda di perbatasan menjadi isu yang cukup berkembang dengan adanya perubahan yang mendasar di negara tetangga baik sosial maupun ekonomi (Stefanus Boisal, Rohaniwan Kristen. FGD. 26 Maret 2014).

Untuk menjawab realitas perubahan tersebut, sebaiknya penyuluh agama honorer harus memenuhi prosedur rekrutmen yang memiliki kompetensi latar belakang pendidikan agama, dan memiliki keterampilan. Dia tidak hanya mahir dan menguasai masalah-masalah spritual melainkan juga masalah sosial. Mengenai materi penyuluhan, harapan adanya semacam petunjuk dari Kementerian Agama sangatlah besar. Menjadi penyuluh agama memang dipahami sebagai panggilan tugas (kewajiban), namun pemerintah perlu memberikan insentif yang cukup kepada penyuluh.

Minimnya dana pembinaan Kementerian Agama Kabupaten Belu, menyebabkan Urusan Agama Kristen hanya melakukan pembinaan penyuluhan hanya satu kali satu tahun kegiatan berupa pelatihan. Kegiatan pembinaan keluarga sejahtera tahun ini pun tidak diselenggarakan menginta keterbatasan dana. Kegiatan ini telah dilakukan pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2013, bertempat di Aula Hotel Klaben Atambua dan dibuka secara resmi oleh Pgs. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Kegiatan ini dihadiri oleh pasangan keluarga Kristen sebanyak 15 orang. Kegiatan ini mengambil motto BERNAS: beriman, rukun, cerdas dan sejahtera.

Dasar teologis kegiatan tersebut tampak pada pernyataan Fransiskus Manek. Menurutnya, orang yang beriman otomatis beragama, tetapi orang beragama belum tentu beriman. Iman tanpa perbuatan mati, karena imanlah yang menjadi dasar dalam kehidupan keluarga. Tanpa dasar ini maka keluarga akan berantakan. Doa adalah cara meningkatkan iman. Salah satu contoh adalah dengan melakukan ibadah dari rumah ke rumah, saling sharing dalam keluarga. Dasar iman Kristiani adalah Yesus Kristus yang bersumber dari Kitab Suci (<http://ntt.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=155127>).

Selanjutnya, terkait dengan pelayanan agama Islam, di Kementerian Agama Kabupaten Belu terdapat beberapa kegiatan pelayanan keagamaan seperti pelayanan pernikahan, wakaf melalui Kantor Urusan Agama, Pelayanan Haji, Umrah, Pendidikan, dan Bimbingan Masyarakat Islam yang di dalamnya terdapat penyuluhan. Saat ini terdapat tiga Kantor Urusan Agama di bawah Kementerian Agama Kabupaten Belu, yaitu KUA Kota Atambua, KUA Tasifeto Barat, dan KUA Malaka Tengah.

Pelayanan pernikahan di KUA tersebut masih dirasa cukup kendati secara personil hanya dilayani oleh dua orang, satu orang kepala, dan seorang staff di setiap KUA. Hal ini seperti yang terjadi pada KUA Malaka Tengah di mana pasangan suami istri masing-masing menjabat kepala KUA dan staff. Tugas Kantor Urusan Agama, selain menangani pernikahan juga melayani pengurusan sertifikat wakaf, haji, dan umrah. Oleh karena itu, jumlah pengurus atau pejabat yang menangani persoalan haji dan umrah perlu ditambah mengingat personilnya sangat terbatas yaitu sebanyak dua pegawai, satu berstatus PNS, dan satu lagi berstatus honorer. Adapun terkait dengan pelayanan haji, dari data yang peneliti peroleh diketahui bahwa antrian

pemberangkatan haji (*Waiting List*) berkisar kurang lebih 2-3 tahun sampai pada tahun 2024 dengan kuota jamaah sebesar 315 untuk Kabupaten Belu.

Dalam bidang penyuluhan Agama Islam, saat ini penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Belu hanya satu orang yang bersatatus PNS, dan tujuh orang berstatus honorer. Sedangkan program kerja penyuluh agama Islam di antaranya: mengidentifikasi potensi wilayah binaan; memfasilitasi pembentukan kelompok binaan; melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama Islam; memfasilitasi peringatan hari besar Islam dalam kelompok bimbingan; melakukan pelatihan seperti praktik wudhu dan sholat, mengajar Iqro dan al-Qur'an; pemberian pemahaman mengenai bacaan ilmu tajwid. Penyuluhan agama Islam ini sangat erat kaitannya dengan pembinaan majlis taklim. Pembinaan majlis taklim ini tidak hanya berupa pemberian siraman rohani, tetapi juga terdapat arisan bergilir, dan program bantuan dari Kementerian Agama berupa dana keluarga pra-sakinah.

Untuk mengeksplorasi lebih lanjut fakta di lapangan, peneliti mengadakan pertemuan yang dilakukan di Masjid An-Nur dengan dihadiri 14 orang perwakilan dari 3 majelis taklim, yaitu Majelis Taklim an-Nur, Husnul Khatimah, dan Sakinah. Pertemuan tersebut adalah untuk membahas kebenaran penerimaan bantuan program pemberdayaan ekonomi pra-sakinah di masyarakat Muslim di Kabupaten Belu. Ibu Suryati dari Majelis Taklim An-Nur menyatakan bahwa pada tahun 2007 telah ada bantuan dana bergulir (pinjaman modal usaha) dari Kementerian Agama kepada majelis taklim yang ada di Kabupaten Belu sebesar Rp. 5.000.000. Bantuan pada tahun-tahun berikutnya bersumber dari BAZ Provinsi NTT berupa program pra-sakinah. Pada tahun 2011, program pra-

sakinah sebesar Rp. 5.000.000 dibagikan kepada 10 orang jamaah. Pada tahun 2012, program pra-sakinah sebesar Rp. 5.000.000 dibagikan kepada 10 orang jamaah. Pada tahun 2013, bantuan pra-sakinah sebesar Rp.15.000.000 disalurkan kepada 3 majelis taklim.

Selain pembahasan bantuan yang diterima, pertemuan tersebut juga membahas tentang efektifitas penyuluh agama Islam. Para peserta pertemuan tersebut menyampaikan bahwa mereka merasa masih kekurangan tenaga penyuluh. Mereka meminta minimalnya satu masjid disediakan satu penyuluh. Ibu Suryanti memaparkan bahwa terdapat 13 masjid di Kabupaten Belu yang terdiri atas 6 majelis taklim di Kota Atambua, dan dua majelis taklim di luar Kota Atambua yakni di Tobir. Mereka juga menyampaikan bahwa selama ini materi penyuluhan yang disampaikan terkait dengan permasalahan ibadah shalat, keluarga sakinah dan aqidah. Ketika ditanya apakah mereka merasa perlu materi tentang kewirausahaan, mereka menjawab perlu dan termasuk materi wawasan kebangsaan. Salah seorang peserta menyatakan bahwa materi lain yang dianggap perlu adalah cara memandikan jenazah.

Sebetulnya telah ada pelatihan memandikan Jenazah yang diselenggarakan oleh Seksi Pendidikan dan Bimas Islam Kantor Kemenag Belu, namun kegiatan tersebut telah lama sekali, dan masih sangat diperlukan. Hal lain yang disampaikan oleh Hadirat adalah informasi bahwa di antara 13 masjid di Kabupate Belu, hanya An-Nur yang tidak diperkenankan oleh pihak yang berwenang di masyarakat tersebut untuk memperdengarkan adzan ke luar masjid. Hal itu terjadi karena adanya protes masyarakat di sekitar masjid yang sebagian besar merupakan masyarakat non-muslim.

Selanjutnya, mengenai pelayanan agama Hindu di sana masih dirasakan sangat kurang. Hal ini disebabkan karena belum adanya seksi khusus yang menangani urusan agama Hindu. Satu-satunya pegawai yang menangani urusan agama Hindu hanya satu orang, dengan status penyuluh dan tenaga administratif untuk agama hindu. Secara struktur, agama Hindu ini belum masuk dalam sistem organisasi di Kementerian Agama Kabupaten Belu. Di samping itu, pemeluk agama yang sama sekali belum dilayani adalah pemeluk agama Budha dan Konghucu. Mengenai perlunya perhatian dari pemerintah dalam pembinaan agama Hindu di perbatasan, I made Sujana, seorang perwira TNI yang bertugas di Tobir, dan memimpin kelompok penganut Hindu menyampaikan bahwa jumlah penganut agama Hindu mencapai 350 jiwa. Saat ini terdapat dua Pura, namun keduanya statusnya hak pakai, mengingat menggunakan lahan milik TNI. Mereka berharap agar pemerintah memfasilitasi pendirian Pura untuk umum yang statusnya merupakan milik masyarakat komunitas agama Hindu.

Umat Hindu di Belu terbagi kepada dua kelompok besar yaitu kelompok Banar Tobing (khusus untuk anggota batalyon TNI AD yang bertugas di Markas Batalyon Tobing) dan Banjar Atambua yang terdiri atas anggota TNI, POLRI dan Sipil Hindu yang ada di Kota Atambua. Pura Atambuanata merupakan sentral prosesi keagamaan Hindu, karena di lingkungan Pura ini masyarakat sipil juga turut mempergunakan. Pura Atambuanata sendiri dibangun di atas tanah milik Kodim Belu, dan dibangun secara swadaya. Kementrian Agama Kabupaten Belu pernah memberikan bantuan renovasi bangunan Pura sebesar Rp 30.000.000.

Pelayanan pendidikan agama Hindu oleh Kementrian Agama, menurut bapak IMade Warna sebagai Ketua Bidang

pendidikan menyampaikan bahwa saat ini Pura Atambunata menyelenggarakan pendidikan yang dinamai Pasraman Widya Loka. Pada pasraman ini, anak didik dibagi 3 sampai 4 kategori. Kategori pertama untuk anak usia kelas 1 – 3 SD. Kategori kedua untuk anak usia 4 - 6 SD. Kategori ketiga untuk anak usia SMP dan kategori keempat untuk anak usia SMA. Saat ini untuk pembinaan pendidikan agama Hindu hanya dilayani oleh 2 orang tenaga honorer dari Kementerian Agama. Untuk itu mereka berharap di tambah tenaga penyuluh, dan pendidik agama Hindu. Kemudian terkait kerukunan umat beragama, tidak ada persoalan dalam hal kehidupan keagamaan dan relasi antar umat Hindu dengan umat lainnya. Hal ini dikarenakan Ketua PHDI Belu, I Gusti Komang sangat aktif dalam kepengurusan FKUB dan juga aktif dalam Forum Pembauran Kebangsaan.

Berdasarkan uraian di atas, problematika pelayanan keagamaan oleh Kantor Kementerian Agama Belu dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu Internal dan Eksternal. Berikut penjelasannya:

### **Permasalahan Internal**

Permasalahan internal yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, selain beragamnya masyarakat di sana termasuk berbagai dinamika persoalan yang dihadapi unit kerja pelayanan agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu juga harus melayani masyarakat dengan berbagai bentuk pelayanan sesuai kebutuhan dan cakupan wilayah yang begitu luas. Ditambah lagi dengan adanya tanggungjawab pembinaan kehidupan dan pengetahuan agama masyarakat di tengah minimnya kondisi pendidikan dan ekonomi mereka.

Jika melihat keadaan wilayah layanan di daerah perbatasan memang sudah seharusnya mendapatkan

perhatian dan layanan yang khusus dan lebih baik mengingat strategisnya isu pembangunan perbatasan. Namun, berbagai tugas dan tanggungjawab tersebut tidak diimbangi oleh kebijakan, program kerja dan sumberdaya manusia yang memadai. Terbatasnya anggaran juga berakibat pada penyelenggaraan berbagai kebijakan, program kerja serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan keagamaan di wilayah perbatasan.

Selama ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu menyelenggarakan kegiatan operasional rutin kantor dengan program-program yang terbatas sebagaimana telah diuraikan di atas. Di samping itu, permasalahan internal lainnya adalah minimnya anggaran untuk menyelenggarakan peningkatan kapasitas para penyuluh agama; kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas bangunan-bangunan rumah ibadah; minimnya program pembinaan agama yang berkorelasi dengan pemberdayaan ekonomi umat dan minimnya jumlah SDM atau tenaga penyuluh yang dibiayai negara.

Salah seorang penyuluh agama Katolik menyatakan bahwa para penyuluh selama ini belum dioptimalkan kapasitas dan perannya. Adanya kendala utama tersebut menyebabkan para penyuluh belum dioptimalkan untuk bekerja dikarenakan belum diberdayakannya Kelompok Kerja Penyuluh. Selain skill para penyuluh masih belum memadai, para penyuluh pun pada kenyataannya tidak semua berlatar belakang pendidikan sarjana agama. Oleh karena itu, perlu metode, materi dan anggaran yang memadai untuk kegiatan penyuluhan guna menghadapi masyarakat yang secara ekonomi dan pendidikan perlu mendapatkan pendampingan. Namun demikian, optimalisasi peran para penyuluh ini tetap saja belum dapat dilaksanakan karena ketiadaan program

dan anggaran untuk membiayai program pelayanan agama.

Berbagai kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya perhatian dan keberpihakan para pemegang kebijakan termasuk para perumus anggaran dalam pelaksanaan program kerja pelayanan agama di daerah perbatasan. Kurangnya pelayanan tersebut tentu saja akan berimbas pada rendahnya pengalokasian anggaran pelayanan agama di daerah perbatasan. Problematika tersebut dapat dikategorikan sebagai kelemahan internal unit kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Meskipun demikian, kelemahan ini dapat dilihat sebagai tantangan atau hambatan dari pihak di luar Kantor Kementerian Agama Belu, dalam hal ini para penentu kebijakan program dan anggaran. Perhatian terhadap isu-isu kawasan perbatasan seharusnya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pelayanan agama di daerah perbatasan.

### Permasalahan Eksternal

Permasalahan eksternal, yaitu situasi yang melatar belakangi proses pelayanan keagamaan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1). Ekonomi; 2). Pendidikan; 3). Keamanan; 4). Pengelolaan pemerintahan (*Good Governance*).

#### *Lemahnya Ekonomi Masyarakat*

Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan, hidup melalui sektor pertanian berkebun, berternak, melaut dan hasil hutan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di lembah-lembah pegunungan, mata pencahariaan mereka bertani (jagung dan padi), berternak sapi, babi dan kambing. Sedangkan masyarakat yang tinggal di perkotaan, terutama kaum pendatang sebagian menjadi pegawai

baik di pemerintahan ataupun di swasta, perdagangan, jasa dan usaha seperti warung makan. Berbagai profesi dan mata pencaharian masyarakat di daerah Belu secara kasat mata belum secara maksimal menyejahterakan kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari cara hidup mereka yang masih sederhana, rumah mereka terbuat dari kayu dan tanpa jamban, dan pakaian yang sederhana.

Walaupun kehidupan ekonomi di Kota Atambua terlihat ramai, namun sebagian masyarakat yang berada di Kota Atambua hanya bekerja sebagai pegawai di instansi pemerintah dan karyawan toko yang dimiliki oleh warga pendatang dari pulau Jawa. Lemahnya ekonomi masyarakat terlihat ketika peneliti pada saat melakukan dialog dengan para penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Mereka menyatakan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi kegiatan penyuluhan agama di masyarakat adalah masalah ekonomi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Gaisson Mbuik, penyuluh agama Kristen.

Masalah ekonomi telah menjadi penyebab rendahnya perhatian masyarakat terhadap berbagai kegiatan keagamaan. Masyarakat disibukkan dengan mengurus persoalan ekonomi keluarga dari pada menghadiri penyuluhan agama. Banyak para penyuluh agama yang telah menempuh jarak cukup jauh dan waktu yang cukup lama untuk mencapai sebuah desa untuk mengadakan penyuluhan agama. Namun, setibanya di lokasi, masyarakat yang hadir sangatlah sedikit, karena mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan untuk pemenuhan kehidupan mereka sehari-hari.

Persoalan kemiskinan pada kenyataannya memang selalu berdampak luas, tidak hanya berpengaruh pada aspek demografis, berupa kelahiran, kematian, dan migrasi serta aspek ekonomi. Tetapi juga berpengaruh pada

situasi keterisolasian dari peran-peran sosial politik, sulitnya mendapatkan pekerjaan serta munculnya perlakuan kehidupan sosial. Kemiskinan juga rentan ditunggangi kepentingan ideologi politik, berupa radikalisme, ekstrimisme, tindakan apatis, dan kemiskinan struktural.

#### *Rendahnya Tingkat Pendidikan*

Masalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tidak hanya bermakna sedikitnya masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, atau banyaknya tenaga kerja produktif yang hanya berbasis pendidikan dasar serta lemahnya pendidikan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan juga terkait dengan masih banyaknya warga yang buta aksara. Dekky Darmawan, Penyuluh Agama Katolik menyatakan bahwa tingkat buta huruf masyarakat Belu adalah 43%. Kondisi semacam ini disampaikan pula oleh Biktus Parera, Camat Kakuluk Mesak yang memimpin kecamatan di kawasan perbatasan. Menurutnya, masalah yang rentan di kawasan perbatasan antara lain, ekonomi, pendidikan dan keamanan. Masalah ini kemudian mengarah kepada masalah rentannya kehidupan keamanan dan rendahnya perhatian masyarakat kepada pembinaan keagamaan. Begitu juga rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan kegiatan keagamaan kurang diperhatikan. Pendidikan yang rendah memunculkan sikap atau pandangan yang keliru tentang peran agama dalam kehidupan.

#### *Isu Keamanan*

Isu keamanan – sebagaimana disampaikan Biktus Parera, Camat Kakuluk Mesak – merupakan salah satu isu krusial di kawasan perbatasan selain ekonomi dan pendidikan. Isu keamanan

yang seringkali muncul adalah masalah konflik antar pemuda dan kriminalitas berupa penyelundupan. Masalah keamanan ini menjadi tantangan bagi pelayanan dan pembinaan keagamaan di kawasan perbatasan. Masalah keamanan yang sering muncul di kawasan perbatasan tersebut terkait erat dengan lemahnya ekonomi dan pendidikan masyarakat.

Pembinaan anak-anak muda yang tidak bekerja juga perlu dilakukan mengingat kondisi anak-anak muda tanpa pekerjaan ini sering berujung pada konflik antar pemuda di kawasan perbatasan, meskipun juga diduga dipengaruhi oleh perseteruan dua perguruan bela diri yaitu perguruan SHT dan Perguruan Kerasakti. Dengan kondisi ini, Biktus berharap anak-anak muda yang tidak bekerja tersebut dilibatkan dalam industri pariwisata di kawasan perbatasan, misalnya dalam pengelolaan parkir dan industri yang terkait pariwisata. Oleh karena itu, persoalan keamanan semacam ini menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi para penyuluh Kantor Kementerian Agama untuk dapat memberikan pelayanan keagamaan berbentuk pembinaan yang tidak hanya menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan konflik kekerasan, tapi juga pembinaan yang memberdayakan ekonomi, keterampilan dan pendidikan.

Selain persoalan di atas, terdapat masalah lain yaitu maraknya praktik penyelundupan yang dilakukan oleh oknum masyarakat, seperti menyelundupkan Bahan Bakar Minyak dari wilayah NKRI ke wilayah Timor Leste melalui jalur-jalur terpencil yang diistilahkan dengan “jalur tikus”. Praktik penyelundupan bahan bakar ke Timor Leste ini tentu menjadi persoalan krusial, mengingat permasalahan energi bersubsidi tersebut sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat perbatasan. Situasi ini menjadi tantangan

dan hambatan tersendiri bagi pelayanan keagamaan di kawasan perbatasan. Artinya pelayanan keagamaan dilakukan di tengah minimnya ketersediaan BBM bersubsidi yang mengakibatkan bertambah sulitnya pelayanan keagamaan. Kesulitan ini juga dialami oleh peneliti ketika mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM bersubsidi di SPBU resmi, dan justru mendapatkannya di tempat eceran masyarakat dengan harga yang berbeda.

#### *Pengelolaan Pemerintahan*

Masyarakat di kawasan perbatasan merupakan masyarakat yang rentan dengan permasalahan ekonomi, pendidikan dan keamanan. Situasi ini mempengaruhi proses partisipasi masyarakat dalam kegiatan agama dan pendidikan agama. Sehingga pelayanan keagamaan harus seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa strategi pembangunan ekonomi, dan kualitas pelayanan kesehatan serta pendidikan. Aspek-aspek tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dan merata terutama bagi masyarakat yang berada di garis batas, dan masyarakat yang belum tersentuh pelayanan. Hal lain yang perlu dikemukakan, di sepanjang garis perbatasan antara Kabupaten Belu, dan Malaka dengan Republik Demokratik Timor Leste, masih banyak perumahan penduduk yang belum dialiri listrik. Keadaan ini peneliti saksikan sepanjang perjalanan Atambua menuju Betun, Malaka tatkala matahari sudah mulai terbenam.

Oleh karena itu, strategi pelayanan keagamaan kawasan perbatasan yang harus dirumuskan selain peningkatan pelayanan oleh Kementerian Agama Kabupaten Belu juga melalui pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan dana operasional, bantuan

pembangunan rumah ibadah, dan kegiatan sosial keagamaan. Perlu juga dibentuk unit khusus yang menangani potensi keberagaman di kawasan terluar di daerah tersebut. Di samping itu, Kementerian Agama perlu meningkatkan koordinasi dengan (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) untuk dapat bersama-sama saling bertukar informasi mengenai kebutuhan masyarakat perbatasan, terutama dalam pelayanan agama. Koordinasi antar kementerian, dan instansi terkait mengenai peningkatan pelayanan agama di perbatasan perlu dilakukan dengan komprehensif, berkesinambungan, dan tidak bersifat parsial.

Terlebih, pembangunan kawasan perbatasan merupakan kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004–2025. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004-2025, salah satu arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia dilakukan melalui pengembangan kawasan perbatasan yang selama ini kurang diperhatikan. Dalam usaha menggagas pelayanan keagamaan yang ideal, perlu diperjelas pula kebijakan riil mengenai peningkatan pelayanan agama bagi kecamatan terdepan yang membatasi kedua negara. Pelayanan agama atas semua umat beragama, dengan memberikan aspek pelayanan agama yang bersifat konseling atau pembelajaran kesadaran beragama, dan pembangunan sarana prasarana rumah ibadah di garis batas perlu kehadiran negara dalam menunjang dan mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini tentu sebagai bentuk kepedulian negara atas pembangunan kehidupan beragama, dan turut serta secara aktif memberikan kesadaran beragamaan di wilayah perbatasan.

Melalui unit kerja Kementerian Agama di tingkat Kecamatan terluar perlu didukung oleh semua pihak dalam memberikan pelayanan agama di wilayah perbatasan.

### **Kebutuhan Masyarakat Perbatasan Terkait Pelayanan Agama**

Setelah dilakukan analisis dari wawancara dengan berbagai narasumber, pengamatan lapangan kebutuhan masyarakat perbatasan di Kabupaten Belu dapat dinventarisasi antara lain: 1). Kebutuhan SDM Penyuluh agama; 2). Program pemberdayaan ekonomi melalui pendekatan agama; 3). Pendidikan agama; 4). Rumah ibadah.

#### *Kebutuhan SDM dan Peningkatan Tenaga Penyuluh Agama*

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyuluhan agama merupakan salah satu bentuk pelayanan agama yang banyak dibicarakan. Pembicaraan kebutuhan tenaga penyuluh agama meliputi tiga isu utama: 1). Isu kuantitas tenaga penyuluh; 2). Kualitas atau kompetensi tenaga penyuluh agama; 3). Kerangka kerja dan modul kegiatan penyuluhan.

Kurangnya jumlah tenaga penyuluh adalah perbandingan antara jumlah tenaga penyuluh dibandingkan dengan jumlah kelompok layanan baik dalam rumah ibadah atau kelompok binaan dan majelis taklim. Seperti penyuluh agama Katolik, ada 7 orang penyuluh yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama, dan 76 Penyuluh Agama Honorar. Hal itu tidak seimbang dengan jumlah rumah ibadah gereja di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Belu yang harus dilayani oleh para penyuluh Katolik dengan jumlah 129 gereja. Dalam beberapa kesempatan dialog yang peneliti lakukan, setiap penyuluh agama Katolik memiliki

pengalaman pembinaan umat beragama yang seragam, dalam artian penyuluh agama Katolik di Kementerian Agama Kabupaten Belu yang bertugas dalam lingkup Paroki, harus memiliki atau mendapatkan izin dari organisasi gereja di setiap Paroki. Karena tugas-tugas di Paroki Katedral diserahkan kepada seksi-seksi dalam DPP (Dewan Pastoral Paroki), maka penyuluh tidak bisa mengambil alih tugas tersebut. Untuk penyuluh Katolik, menurut Ibu Elisabet, hanya dapat mengambil satu bidang organisasi gereja sebagai kelompok binaan, satu kelompok umat basis, dan satu kelompok anak-anak cacat.

Kelompok binaan yang ada memiliki banyak tantangan, karena jumlah penyuluh dirasakan kurang. Apabila di suatu tempat penduduknya banyak, terdapat 20 kelompok binaan, adapun bagi daerah yang jarang jumlah penduduknya terdapat 15 kelompok binaan. Penyuluh agama dalam menjalankan kegiatan pada sore, dan malam hari, karena pagi harinya bertugas di kantor, sebagai tenaga administrasi. Setidaknya dibutuhkan 3 penyuluh untuk tiap Paroki. Karena setiap paroki membina tiga kategori jamaah, antara lain dewasa, muda-mudi dan anak-anak. Dengan pemetaan pengakuan pemuka agama tentang kebutuhan tiga tenaga penyuluh di setiap paroki, kapela dan stasi, maka jumlah tenaga penyuluh agama katolik yang dibutuhkan adalah 813 penyuluh. Untuk itu, apabila hal ini dipenuhi, jumlah penyuluh yang harus diberikan adalah sebanyak 813 penyuluh (delapan ratus tiga belas penyuluh). Apabila jumlah ini dirasakan amat banyak, dapat pula diberikan masing-masing rumah ibadah dua penyuluh. Maka angka jumlahnya menjadi 542 orang. Jumlah ideal minimal apabila masing-masing rumah ibadah diberikan satu penyuluh honorar, maka pemerintah memberikan tenaga penyuluh honorar sebanyak 251 orang. Saat ini jumlah penyuluh di lingkungan

Kementrian Agama Kabupaten Belu berjumlah 76 penyuluh.

Demikian kebutuhan penyuluh agama Kristen Kabupaten Belu, dan Malaka. Terdapat delapan aliran gereja yang tersebar di dua kabupaten di perbatasan ini, Jumlah penyuluh PNS pada Urusan Agama Kristen sebanyak dua orang, adapun penyuluh honorer agama Kristen hanya enam orang. Fenomena penurunan jumlah penyuluh honorer ini dirasa berat oleh urusan agama Kristen, mengingat cakupan wilayah pelayanan mencapai 17 wilayah, dengan 82 gereja, dan pemeluk agama yang mencapai kisaran 25.055 jiwa. Menurut pemuka agama Kristen, idealnya, jumlah penyuluh pada agama Kristen di Kabupaten Belu sebanyak 82 gereja dengan masing-masing gereja diberikan tiga penyuluh honorer. Bahkan menurut Stefanus Boisal dalam acara FGD, penyuluh honorer tersebut tidak hanya mewakili pendeta, dan guru agama semata, bisa juga diambil dari kalangan pemuda dan perempuan.

Dalam hal penyuluh Agama Islam, saat ini di Kementerian Agama Kabupaten Belu satu orang yang berstatus PNS, tujuh orang berstatus honorer. Berdasarkan informasi dari Ibu Suryanti seorang pengurus majelis taklim di Kota Atambua, diketahui bahwa penyuluh agama Islam harus melayani kegiatan keagamaan di 13 masjid di Kabupaten Belu. Di antara masjid-masjid tersebut, terdapat 6 majelis taklim di Kota Atambua, dan dua majelis taklim di luar kota Atambua yakni di Tobir. Para pengurus majelis taklim yang diwawancarai oleh peneliti meminta minimalnya satu masjid disediakan satu penyuluh. Sedangkan kebutuhan tenaga penyuluh agama Hindu di Kabupaten Belu, terungkap pada pertemuan antara peneliti dengan tokoh – tokoh pemuka agama Hindu tersebut memberikan gambaran bahwa perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait pembinaan agama

Hindu di perbatasan. I Made Sujana, seorang perwira TNI yang bertugas di Tobir, dan memimpin kelompok penganut Hindu di sana menyampaikan bahwa setidaknya saat ini ada 150 anggota TNI di Belu yang bergama Hindu, apabila ditambah dengan anggota keluarga yang ikut maka bisa mencapai 200 orang. Lebih lanjut I Made Warna menyampikan bahwa jumlah itu jika ditambah masyarakat sipil dan anggota polisi akan mencapai 350 jiwa penganut agama Hindu di perbatasan Kabupaten Belu. Semua anggota jamaah itu hanya dibina oleh seorang penyuluh agama yang merangkap tenaga administrasi. Kebutuhan jumlah tenaga penyuluh agama di Kabupaten Belu tidak hanya persoalan penambahan personil saja, tetapi juga terkait dengan keterjangkauan akses layanan yang diberikan oleh penyuluh agama tersebut. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah tenaga penyuluh agama, maka bertambah luas pula jangkauan layanan penyuluhan agama di wilayah pelayanan Kabupaten Belu.

#### *Peningkatan Kapasitas, Kompetensi Tenaga dan SDM Penyuluh Agama.*

Selain persoalan jumlah tenaga yang terbatas, juga peningkatan terhadap SDM Penyuluh agama perlu ditingkatkan terutama penyuluh Agama Katolik yang tergabung dalam kelompok KOPJALU masih mempunyai beberapa permasalahan, yaitu terkait keahlian penyuluh yang kurang memadai, karena bukan berlatar belakang agama. Penyuluh yang ada lebih banyak karena *impassing*, pelimpahan dari pejabat eselon lima yang tidak memiliki ketrampilan sebagai penyuluh. Selain itu penyuluh di kelompok binaannya kurang mendapat tempat yang semestinya sehingga pelayanan kurang maksimal. Umat merasa lebih memperhatikan kepasturan, dari pada oleh penyuluh sendiri.

Persoalan mengenai kapasitas penyuluh ini dikuatkan oleh Bapak Abdurrahman (Pengurus MUI Belu), bahwa kapasitas para penyuluh Agama Islam pun harus lebih ditingkatkan dengan kemampuan menyampaikan materi-materi yang tidak hanya masalah keakhiratan tapi juga pembekalan dunia seperti politik, budaya maupun kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian bahwa penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Belu dapat digambarkan bahwa penyuluh agama Kabupaten Belu ingin mencoba mengembangkan berbagai materi penyuluhan secara mandiri namun tetap berkoordinasi dengan organisasi keagamaan terkait. Hal itu disampaikan oleh Elisabeth Seran, seorang penyuluh agama Katolik. Beliau menyampaikan bahwa terkait pemberian materi dalam penyuluhan keagamaan di Paroki, materi yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi di gereja tersebut.

Demikian juga dengan penyuluhan agama Islam. Sri Handayana, penyuluh agama Islam menyampaikan bahwa materi yang disampaikan dalam pembinaan adalah membaca Al-Qur'an sebagai program menghapus buta aksara membaca al-Qur'an. Adapun dalam penyuluhan keagamaan, penyajian materi dilakukan dengan metode ceramah. Dalam berbagai wawancara dan diskusi dengan para tokoh agama baik di MUI, perwakilan majelis taklim dan perwakilan tokoh agama Hindu, ada berbagai harapan agar materi-materi yang disampaikan para penyuluh agama dapat disusun dengan baik berdasarkan kebutuhan umat. Hal tersebut dapat menjawab berbagai persoalan tentang rendahnya partisipasi masyarakat yang terkait dengan persoalan sosial, pendidikan dan ekonomi. Penyusunan materi tersebut dapat dirumuskan dalam suatu kerangka kerja dan modul penyuluhan. Kerangka kerja dan modul penyuluhan tersebut harus didasarkan pada kebutuhan

masyarakat di perbatasan. Kebutuhan diidentifikasi berdasarkan situasi sosial, pendidikan, budaya dan ekonomi masyarakat perbatasan. Kerangka Kerja dan modul tersebut harus membentuk masyarakat di kawasan perbatasan yang memiliki kecintaan dan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, juga meningkatkan kualitas kehidupan mereka menjadi warga yang cerdas, maju dan sejahtera.

#### *Kegiatan Keagamaan dengan Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi*

Masyarakat di kawasan perbatasan secara ekonomi lemah. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap tempat tinggal warga dan wawancara dengan beberapa warga yang berprofesi sebagai nelayan di Kolam Susuk, dan warga yang berjualan buah-buahan hasil tani di pinggir jalan antara Atambua dan Kolam Susuk, menggambarkan lemahnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat rendahnya pendapatan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya menjadi gambaran kesulitan masyarakat tapi juga menjadi tantangan yang berat dalam kegiatan penyuluhan agama. Sebuah program yang mengaitkan masalah ekonomi masyarakat dengan penyuluhan agama adalah program yang diberikan dari Kementerian Agama untuk majelis taklim. Hal tersebut terungkap dalam wawancara dan diskusi yang dilakukan peneliti di Masjid An-Nur dengan dihadiri 14 orang perwakilan dari 3 majelis taklim: 1). An-Nur; 2). Husnul Khatimah; 3). Sakinah. Ibu Suryati, pengurus Majelis Taklim An-Nur menyatakan bahwa pada tahun 2007 telah ada bantuan dana bergulir (pinjaman modal usaha) dari Kementerian Agama kepada majelis taklim yang ada di Kabupaten Belu sebesar Rp. 5.000.000. Bantuan pada tahun-tahun berikutnya bersumber dari BAZ Provinsi NTT berupa program pra-sakinah. Selanjutnya, pada tahun 2011,

program pra-sakinah: Rp. 5.000.000, yang dibagikan kepada 10 orang jamaah. Pada tahun 2012, program pra-sakinah adalah sebesar Rp 5.000.000, pada tahun 2013, bantuan pra-sakinah sebesar Rp. 15.000.000 yang disalurkan kepada 3 majelis taklim.

Bantuan pra-sakinah pun menjadi persoalan karena jumlah bantuan tersebut tidak efektif sebagai modal usaha. Bantuan 5 juta dibagi 10 orang maka setiap orang mendapatkan 500 ribu rupiah. Jumlah tersebut tidak cukup untuk modal usaha, sehingga bantuan tersebut lebih mirip sebagai santunan. Berbagai pendapat yang tercurah dalam wawancara menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk pelayanan keagamaan yang sangat dibutuhkan. Dana bantuan yang ada memang belum sesuai dengan peruntukannya berupa bantuan modal usaha dan bukan sekedar santunan. Selain besaran paket yang belum memadai sebagai modal, harapan masyarakat jumlah paket yang disediakan lebih banyak lagi agar menjangkau kaum dhuafa yang ada.

Kebutuhan akan program pemberdayaan ekonomi sebagai pelayanan agama tidak hanya terkait kondisi umat berekonomi lemah sehingga perlu program khusus untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan agama. Namun, kebutuhan akan program ini juga terkait dengan kondisi khas daerah Belu yang berbatasan dengan Timor Leste, termasuk menyalurkan modal usaha kepada kaum dhuafa ekspengungsi dari Timor Timur. Program pemberdayaan ekonomi dalam pelayanan agama selama ini pelayanan baru dilakukan oleh kelompok Islam, sehingga perlu dilakukan untuk kelompok agama lain. Pernyataan tersebut menunjukan bahwa untuk sementara ini Kementerian Agama RI baru menurunkan program pra-sakinah melalui majelis taklim.

Sehingga diperlukan peningkatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disalurkan dan dikelola oleh kelompok agama lain.

#### *Pendidikan Formal keagamaan*

Salah satu masalah yang dihadapi di kawasan perbatasan adalah rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada kualitas taraf hidup sosial dan budaya. Pelayanan keagamaan di daerah perbatasan juga dituntut untuk bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kecerdasan masyarakat. Pelayanan agama harus memiliki dampak meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang dilayani. Salah satu bentuk upaya pelayanan agama dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan formal lembaga keagamaan. Pendidikan formal agama dapat diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama maupun oleh organisasi keagamaan.

Pendidikan formal agama hanya diselenggarakan oleh beberapa yayasan Islam antara lain: SMP Islam Al-Muhajirin, Madrasah Tsanawiyah Mutmainnah, MI Al-Islamiyah, MI Hidayatullah dan MI Al-Qadar (Malaka Tengah). Hingga penelitian ini dilakukan, belum ada lembaga pendidikan formal Katolik dan Kristen. Berdasarkan gambaran tersebut, maka diperlukan upaya pelayanan agama di Kabupaten Belu yang berbentuk sekolah formal agama atau berbentuk bantuan kepada organisasi keagamaan untuk menyelenggarakan pendidikan formal keagamaan.

#### *Kebutuhan Rumah Ibadat*

Kebutuhan rumah ibadat merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda untuk dibangun terkait dengan pelayanan agama bagi masyarakat

perbatasan. Masalah ketiadaan rumah ibadah tidak hanya dirasakan oleh para penganut agama Hindu tetapi juga bagi umat lainnya. Hal tersebut terungkap dalam peretmuan antara tim peneliti dengan para tokoh pemuka Hindu seperti I Made Wayan Sujana (Ketua Banjar Tobir), I Wayan Merta (Ketua Banjar Atambua), I Wayan Sumada (Pinanditha), I Made Warna (Ketua Bidang Pendidikan Pura Atambunata), dan I Made Balik (Perwakilan Hindu di Forum Pembauran kebangsaan Belu). Hingga saat ini, masyarakat Hindu beribadah di rumah ibadah yang berada di tengah kompleks militer. Pura yang menjadi pusat kegiatan masyarakat Hindu di Kabupaten Belu adalah Pura Atambuanata.

Ketiadaan rumah ibadah yang terjadi di beberapa bagian kawasan perbatasan tersebut dinyatakan oleh Kapten Prabawa, seorang komandan kompi pasukan penjaga perbatasan yang berasal dari KODAM Udayana. Ia merasa kesulitan beribadah di pos perbatasan karena ketiadaan rumah ibadah. Berdirinya Pura Atambuanata sendiri dibangun di atas tanah milik Kodim Belu yang dibangun secara swadaya dan pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama RI sebesar Rp. 30.000.000. Terkait dengan isu bantuan pembangunan rumah Ibadah, para tokoh agama menyampaikan kebutuhan mereka akan adanya Pura yang diperuntukan untuk umum dan menjadi milik umat karena Pura yang digunakan adalah milik Kodim, umat Hindu hanya diberikan hak pakai.

Ada beberapa rumah ibadah yang telah dibangun sejak lama dan tidak lagi dapat memenuhi pelayanan bagi umatnya atau bangunannya telah terlalu tua dan rusak. Hal tersebut dikemukakan oleh Lazamudin, pengurus DKM Al-Falah di Desa Kletek, salah satu desa terluar kawasan perbatasan RI-Timor Leste di Malaka. Ia menyatakan bahwa bantuan

fisik bangunan masjid yang berdiri pada tahun 1987 pada masa pemerintahan Orde Baru, sampai saat ini belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Ia menyampaikan bahwa warga Muslim memerlukan bantuan pembangunan untuk renovasi masjid terutama pagar masjid. Hal serupa juga disampaikan oleh Marcelinus Seran, Stasi Desa Suai dan Kletek yang melayani 4 lingkungan yang membawahi seluruhnya 42 Kelompok Umat Basis, dengan jumlah jamaat sekitar 500 Kepala Keluarga. Selama ini baru mendapatkan bantuan dari pemerintah (Kementerian Agama Kabupaten Belu) berupa biaya renovasi Kapela sebesar Rp.10.000.000.

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, pelayanan keagamaan bagi masyarakat kawasan perbatasan di Kabupaten Belu belum cukup dirasakan oleh masyarakat, karena masih ada beberapa kendala misalnya, minimnya sarana dan prasarana, keterbatasan tenaga pendidik dan penyuluh, lokasi yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat sehingga menyulitkan petugas yang akan melakukan pembinaan kepada masyarakat.

*Kedua*, pelayanan keagamaan kawasan masyarakat perbatasan di Kabupaten Belu masih mengalami berbagai problem seperti terbatasnya anggaran di samping masalah eksternal berupa lemahnya ekonomi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan ditambah dengan masalah keamanan di kawasan perbatasan.

*Ketiga*, interaksi budaya masyarakat kawasan perbatasan di Kabupaten Belu dengan masyarakat negara Timor Leste menjadi faktor yang turut mempengaruhi

berbagai aspek, di antaranya sistem nilai, sistem kekerabatan, kondisi lingkungan, persoalan ekonomi, dan pendidikan yang masih rendah.

*Keempat*, kebutuhan masyarakat kawasan perbatasan di wilayah Kabupaten Belu antara lain: penambahan sarana dan prasarana rumah ibadah, pendidikan, jumlah penyuluh agama, sistem seleksi, dana memadai, pelatihan dan keterampilan bagi penyuluh agama dalam rangka meningkatkan keahlian penyuluh. Khusus umat Buddha dan Konghucu perlu adanya seksi dalam struktur organisasi di Kementerian Agama Kabupaten Belu untuk melayani umatnya.

Atas kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran kepada *Pertama*, Kementerian Agama perlu meningkatkan kuantitas dan kapasitas serta kualitas tenaga penyuluh agama

dengan melakukan berbagai pelatihan bagi penyuluh agama yang selama ini dirasakan belum memadai. *Kedua*, pelayanan keagamaan idealnya dilakukan bersamaan dengan peningkatan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di daerah perbatasan. *Ketiga*, pelayanan keagamaan sebagai strategi dan misi pelayanan tidak hanya dilihat dari segi keimanan tetapi juga harus dilihat dalam beberapa aspek terutama aspek ekonomi yang selama ini wilayah perbatasan dinyatakan daerah tertinggal. *Keempat*, untuk mengentaskan ketertinggalan perlu dibangun sarana rumah ibadah yang layak dan penyelenggaraan pendidikan non-formal dan formal keagamaan sebagai bentuk pelayanan keagamaan yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pengamalan ajaran agama bagi masyarakat perbatasan agar tidak tertinggal dengan daerah lain.

### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Belu dalam Angka*. 2013.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*. 2000. <http://ntt.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=155127>
- "Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur." 14 April 2014. [Http://ntt.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=157515](http://ntt.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=157515).
- "Kementerian Agama. RI, Kabupaten Nunukan Minta Madrasah Negeri di Daerah Perbatasan", (Tribunnews.com, diunduh Minggu, 5 Januari 2014) Lyotard, Jean-François. *Posmodernisme: Krisis dan Masa Depan Pengetahuan*. Yogyakarta: Teraju, 2004.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta, 2011.
- "Menteri Agama Bakal Hadiri Peletakan Batu Pertama." 14 Desember 2013. [Http://www.haluankepri.com](http://www.haluankepri.com).
- "Pemerintah Kembangkan Pesantren Perbatasan." 24 Desember 2013. [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id).
- Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. *Laporan Bulanan*. 2012
- Ratnawati Tri. *Maluku dalam Catatan Seorang Peneliti*. Jakarta, 2006.
- Widiastono, Tonny D. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas, 2004,